

2025

Laporan Keberlanjutan

SUSTAINABILITY REPORT



PT. BPR Syariah Ingin Jaya

Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Kata Pengantar	ii
1. Pendahuluan dan Strategi Keberlanjutan	1
2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan.....	7
3. Profil Bank	12
4. Penjelasan Direksi	15
5. Tata Kelola Keberlanjutan	25
6. Kinerja Keberlanjutan	29
6.1. Kinerja Ekonomi	29
6.2. Kinerja Sosial	31
6.3. Kinerja Lingkungan Hidup	31
6.4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan.....	32
7. Verifikasi Dan Pemangku Kepentingan.....	34
7.1. Verifikasi Pihak Independen.....	34
7.2. Pihak Pemangku Kepentingan	34
8. Umpan Balik	36

Kata Pengantar

Di tahun 2025, PT. BPR Syariah Ingin Jaya telah melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025 sesuai POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. PT. BPR Syariah Ingin Jaya menerapkan program- program kerja yang disusun dalam RAKB sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

BPR Syariah (Bank Perekonomian Rakyat Syariah) sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menyadari pentingnya isu pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip *triple bottom line* yaitu *people* (kesejahteraan masyarakat), *profit* (keuntungan) dan *planet* (lingkungan hidup) dalam kegiatan usaha Bank dengan menyelaraskan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST).

PT. BPR Syariah Ingin Jaya sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dana pihak ketiga (DPK) dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat, BPR Syariah dituntut untuk bisa selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur dengan menghindarkan pada kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan hidup, fokus pada usaha debitur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga BPR Syariah mendapatkan keuntungan dari pendapatan margin pembiayaan.

Dalam hal ini PT. BPR Syariah Ingin Jaya berkomitmen untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan sebagai langkah bersama bagi Sektor Jasa Keuangan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menyangkut Keberlanjutan Bank sebab ketidakpedulian terhadap isu lingkungan hidup dan sosial dapat meningkatkan risiko bagi Perbankan khususnya peningkatan risiko kredit akibat kegagalan bayar (*default*) debitur yang memiliki usaha berdampak negatif terhadap lingkungan dan kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Keberlanjutan (SR – *Sustainability Report*) PT. BPR Syariah Ingin Jaya Tahun 2025 ini berisi informasi mengenai kinerja keberlanjutan Bank dalam bidang ekonomi, lingkungan maupun sosial kepada seluruh pemangku kepentingan. PT. BPR Syariah Ingin Jaya dengan modal inti kurang dari Rp 50 milyar, sebagaimana ketentuan dari OJK untuk pertama kali menyusun Laporan Keberlanjutan di tahun 2026 yaitu Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 dan wajib disampaikan ke OJK secara daring (online) melalui Aplikasi Pelaporan Apollo paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan yang berlaku. Dengan demikian PT. BPR Syariah Ingin Jaya menyusun Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 yang memuat informasi untuk periode pelaporan 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Penyusunan Laporan Keberlanjutan ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 dan Pedoman Teknis Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017.



1.

Pendahuluan dan Strategi Keberlanjutan

Tentang Laporan Keberlanjutan



Sesuai POJK No. 51 / POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan pasal 10 secara substantif mewajibkan BPR/ BPRS untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Untuk itu BPR/ BPRS wajib menyusun dan **menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) atau SR (Sustainability Report) Tahun 2025 ke OJK paling lambat tanggal 30 April 2026** bersamaan dengan Laporan Tahunan BPR/BPRS Tahun 2025.

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Mengacu pada Lampiran 2 POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan bahwa format penulisan Laporan Keberlanjutan sebagai berikut:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan
2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup)



3. Profil Singkat BPR/BPRS
4. Penjelasan Direksi
5. Tata kelola keberlanjutan
6. Kinerja keberlanjutan
7. Verifikasi tertulis dari pihak independen
8. Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca dan
9. Tanggapan BPR/BPRS terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.



Acuan dan Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan PT. BPR Syariah Ingin Jaya tahun 2025 disusun dengan mengkomodir standar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Laporan Keberlanjutan ini tidak lepas dari laporan tahunan yang telah disusun dengan laporan keuangan teraudit untuk tahun buku 2025. PT. BPR Syariah Ingin Jaya membuat dan melaporkan kinerja keberlanjutan dalam periode 1 (satu) tahun buku (tahunan) mulai tahun 2025 ini. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keberlanjutan PT. BPR Syariah Ingin Jaya tahun 2025 ini memuat data dan informasi yang dikumpulkan dalam 1 (satu) tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Prinsip penetapan konten dalam Laporan ini didasarkan pada POJK 51/ POJK.03/2017 dan disusun berdasarkan 2 prinsip, yaitu prinsip isi dan kualitas.

Prinsip isi meliputi:

1. Konteks berkelanjutan: Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) ini disusun sejalan dengan konteks keuangan berkelanjutan.



2. Kelengkapan: Informasi disajikan sebagai informasi kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan kelengkapan bagi pembaca.

Prinsip kualitas adalah:

1. Keseimbangan: Informasi terkait capaian dan prestasi, serta tantangan disampaikan sesuai dengan kondisi perusahaan.
2. Komparabilitas: Data yang disampaikan dalam laporan disajikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Akurasi: Angka dan informasi telah diperiksa secara internal Perusahaan sehingga diyakini akurasi.
4. Ketepatan waktu: Laporan ini disajikan tepat waktu bersama dengan Laporan Tahunan.
5. Kejelasan: Informasi yang disajikan dalam laporan mudah untuk dipahami.

Topik material dalam Laporan ini adalah topik– topik yang telah diprioritaskan oleh organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak dalam Laporan ini termasuk di dalamnya yang bernilai positif. Penetapan aspek material dan batasan didasarkan pada isu– isu yang berpengaruh signifikan bagi PT. BPR Syariah Ingin Jaya serta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, BPR Syariah mengacu pada 8 (delapan) Prinsip keuangan berkelanjutan, dan 3 (tiga) prioritas sesuai POJK No. 51/2017. Delapan prinsip keuangan berkelanjutan yang dikembangkan oleh PT. BPR Syariah Ingin Jaya adalah:

1. **Investasi yang bertanggung jawab;** adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi yang bertujuan agar dapat mengelola risiko secara lebih baik. Kami menerapkan prinsip ini melalui pemberian kredit yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dengan menganalisis potensi risiko yang ditimbulkan dari usaha yang dibiaya oleh Bank.
2. **Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan;** Kami menerapkan prinsip ini dengan menuangkannya pada kebijakan keberlanjutan yang dituangkan dalam dokumen RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) yang menjadi landasan BPR Syariah Ingin Jaya dalam menjalankan bisnis berkelanjutan di kegiatan usaha Bank.
3. **Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup ;** Kami telah memiliki prinsip kehati– hatian (*Prudential Banking*) dalam mengukur risiko yang dikelola dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) Bank. Selain risiko–risiko finansial, kami juga melakukan proses manajemen risiko khususnya mengukur risiko pemberian kredit atau pinjaman yang bersentuhan langsung dengan aspek sosial dan lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
4. **Prinsip Tata Kelola;** Kami menerapkan tata kelola keberlanjutan (ekonomi, lingkungan dan sosial) yang dibangun berdasarkan prinsip– prinsip penerapan GCG (*Good Corporate Governance*), yaitu transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan kewajaran.
5. **Prinsip Komunikasi yang Informatif;** Kami menyediakan laporan yang informatif



mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan prospek Bank yang dapat dengan mudah diakses oleh para *stakeholder* melalui situs web PT. BPR Syariah Ingin Jaya <https://www.bankinginjaya.co.id>

6. **Prinsip Inklusif;** Bank menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/ atau jasa yang dapat dengan mudah diakses oleh nasabah. Bank memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang mudah dan merata terhadap layanan yang keuangan BPR Syariah Ingin Jaya.
7. **Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas ;** Dalam menyusun program keberlanjutan, kami mempertimbangkan sektor- sektor unggulan prioritas yang telah kami tetapkan dalam RAKB (Rencana Aksi Keuangan Bank). Hal ini kami lakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan mendukung program pemerintah dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.
8. **Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi;** Kami membuka diri untuk berkomunikasi dan berkerja sama dengan lembaga atau pemerintahan setempat terkait Bisnis Berkelanjutan dalam rangka penyelarasan strategi keberlanjutan Bank. Hal ini terlihat dari keanggotaan perusahaan pada perbarindo dan partisipasi dalam mendukung kegiatan- kegiatan yang memberdayakan masyarakat.



Sedangkan **tiga prioritas RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)** adalah:

1. Pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, antara lain mengidentifikasi dan memonitor portofolio pembiayaan Bank yang menunjang keuangan berkelanjutan.



2. Pengembangan kapasitas internal Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan meningkatkan *awareness* mengenai keuangan berkelanjutan (untuk pegawai dan nasabah), implementasi keuangan berkelanjutan pada sektor-sektor usaha yang menjadi fokus Bank.
3. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/ atau standar prosedur operasional, antara lain menyiapkan kebijakan Keuangan Berkelanjutan, penyesuaian kebijakan internal Bank lainnya seperti Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian, Kebijakan tata kelola keberlanjutan.



Strategi Keberlanjutan

Strategi keuangan berkelanjutan disusun berdasarkan pertimbangan visi dan misi Bank dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Bagi Bank, penerapan keuangan berkelanjutan bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, namun juga sebagai strategi untuk mewujudkan visi Bank khususnya dalam penerapan prinsip inklusi keuangan.



Segmen UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang menjadi sasaran utama Bank dalam pelayanan jasa keuangan diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi. Selain itu, melalui pengembangan produk dan/ atau jasa keuangan berwawasan lingkungan, Bank berupaya meningkatkan peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs – *Sustainable Development Goals*) . Hal ini diwujudkan dalam berbagai upaya, di antaranya dengan menyusun rencana kerja, dan mengembangkan RAKB sesuai dengan ketentuan regulator.

Sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab dan Lingkungan Perseroan Terbatas, PT. BPR Syariah Ingin Jaya mulai menerapkan prinsip-prinsip *go green company* sejak penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan menjalankan kegiatan-kegiatan diantaranya :

1. Mengampanyekan efisiensi penggunaan air di setiap toilet yang berada di lingkungan kantor BPR Syariah dengan memasang pamflet “Gunakan air seperlunya”, “Hemat air”, atau “Matikan air setelah selesai digunakan”.
2. Mengampanyekan lingkungan kerja menjadi lebih sehat dengan motto “BERSIH itu SEHAT” dengan memasang pamflet di tempat-tempat yang mudah terlihat. .
3. Menjalankan program “Hemat Energi” dengan pembatasan penggunaan AC dan listrik setelah jam kerja dan mematikan lampu di ruangan yang tidak digunakan.
4. Program penggunaan *tumbler* sebagai pengganti gelas air minum atau air dalam kemasan.





2.

Ikhtisar Aspek Keberlanjutan

Aspek Ekonomi

Tabel 2.1 Ikhtisar Kinerja Aspek Ekonomi

Nominal uang dalam jutaan rupiah

Keterangan	2025	2024	2023
Pendapatan Operasional Bank (Rp)	2.833.666.288	8.355.885.995	8.636.182.082
Laba Bersih Bank (Rp)	847.220.835	1.416.188.120	2.311.505.700
Kinerja Aspek Ekonomi terkait Keberlanjutan			
Jumlah jenis produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan	1	1	1
Nominal produk penghimpunan dana yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)	30.701.918.492	14.184.723.765	15.382.235.016
Nominal produk penyaluran dana pembiayaan yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)	18.440.313.399	13.959.311.624	27.447.205.671
Persentase total portofolio kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total portofolio (%)			
a. Penghimpunan Dana (%)	53,26	18,59	17,87
b. Penyaluran Dana (%)	46,74	67,56	66,78
Kinerja Keuangan Inklusif			
Perkembangan Laku Pandai			
a. Jumlah Agen	0	0	0
b. Nominal produk dan/atau jasa yang disediakan oleh Agen	0	0	0



Pemberian layanan keuangan di segmen UMKM, yang menjadi fokus utama Bank, merupakan segmen pasar yang sangat potensial. UMKM, yang termasuk dalam salah satu kategori KUB (Kategori Usaha Berkelanjutan), saat ini telah menjadi pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip investasi bertanggung jawab dimana Bank mempertimbangkan peningkatan keuntungan ekonomi dan kesejahteraan sosial nasabah dalam penyaluran dana.



Aspek Lingkungan Hidup

Tabel 2.2 Ikhtisar Kinerja Aspek Lingkungan Hidup

Nominal uang dalam satuan rupiah penuh

Keterangan	2025	2024	2023
Beban Penggunaan Kertas (Rp)	46.002.150	48.147.000	54.641.000
Beban Penggunaan Listrik (Rp)	87.870.995	79.803.561	81.410.517
Beban Penggunaan Air (Rp)	4.043.000	3.059.000	3.650.900
Beban Penggunaan BBM (Rp)	84.584.917	92.689.886	93.074.191

Kriteria Pembiayaan usah Berkelanjutan yang diharapkan untuk didukung oleh lembaga keuangan mencakup efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Bank menyadari bahwa untuk mendorong masyarakat mengembangkan kegiatan usaha yang mempertimbangkan dampak lingkungan harus dimulai



dari cara Bank beroperasi.

Sebagaimana tercantum pada RAKB 2026, Bank telah menempatkan operasional bank ramah lingkungan sebagai bagian dari rencana strategis keuangan berkelanjutan. Dalam rangka memastikan kegiatan operasional dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, budaya kesadaran lingkungan penting untuk dibangun di dalam Bank. Oleh karena itu, Bank berkomitmen untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan data lingkungan di Kantor pada tahun 2026.

Dalam hal operasi ramah lingkungan, sosialisasi telah dilaksanakan di lingkungan kantor dan selain itu, Bank juga telah menerbitkan Surat Kewaspadaan yang berisi informasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari budaya perusahaan terkait dengan peduli lingkungan.

Efisiensi Penggunaan Kertas

Kertas merupakan kebutuhan penting dalam operasional Bank. Kertas antara lain dipakai untuk administrasi perkantoran, seperti surat– menyurat, memo, mencetak berbagai laporan perusahaan, pendaftaran, dan pencetakan buku nasabah, pencatatan transaksi setoran, penarikan dan lain– lain. Bank menyadari bahwa bahan baku kertas adalah bubur kayu yang didapat dari penebangan kayu. Karena itu, Bank berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penghematan penggunaan kertas. Dengan penghematan kertas, maka Bank turut mengurangi dampak negatif bagi lingkungan, seperti penebangan pohon dan emisi gas rumah kaca.

Tahun 2025, beban pembelian kertas di Bank secara umum mengalami penurunan dari nominal Rp 48 juta tahun 2024 menjadi Rp 46 juta di tahun 2025. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan kertas bekas (sisi sebaliknya) untuk mencetak draft surat/memo.

Ke depan dengan adanya penerapan digitalisasi pelaporan yang dicanangkan oleh OJK melalui POJK No. 23 Tahun 2024 yang menggeser penyampaian laporan secara luring (*offline*) menjadi daring (*online*) membantu Industri BPR Syariah untuk mengurangi penggunaan kertas (*paperless*).

Efisiensi Penggunaan Listrik

Listrik digunakan untuk penerangan, penggerak sarana– prasarana kantor seperti mesin fotokopi, AC, Komputer dan sebagainya. Bank menyadari bahwa sebagian besar listrik yang dipakai saat ini bersumber dari PLTU, yang menggunakan batu bara sebagai sumber pembangkit, yang termasuk sumber energi tak terbarukan. Oleh karena ketersediaan listrik semakin terbatas, Bank berupaya untuk melakukan efisiensi sehingga tidak terjadi pemborosan energi.

Berdasarkan tabel diatas terlihat pemakaian listrik dari tahun 2024 dengan nominal Rp 79 juta



mengalami kenaikan pada tahun 2025 dengan nominal Rp 87 juta, sehingga program hemat energi yang dicanangkan Bank belum terlaksana dengan baik.

Efisiensi Penggunaan Air

Bank telah memulai inisiatif sederhana dalam upaya efisiensi penggunaan air dengan menumbuhkan kesadaran untuk menghemat air melalui pemasangan stiker dan poster di lokasi dimana air bersih digunakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai.

Efisiensi Penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak)

BBM dipakai juga untuk kendaraan operasional kantor. Sementara itu, selain dipakai untuk menggerakkan genset, BBM dipakai juga untuk kendaraan operasional kantor. Kategori yang sama berlaku untuk jenis BBM yang digunakan Bank, yaitu bensin dan solar.

**Aspek Sosial**

Tabel 2.3 Ikhtisar Kinerja Aspek Sosial

Nominal uang dalam satuan rupiah penuh

Keterangan	2025	2024	2023
Dana Sosial Yang Disalurkan	20.000.000	0	0



Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) haruslah senantiasa ditanamkan kepada seluruh pegawai agar dapat menjadi budaya yang mampu mendukung keberlanjutan operasional Bank. K3 merupakan aspek penting yang wajib diterapkan di seluruh kegiatan operasi, dalam bekerja dengan sesama pegawai, melayani nasabah, bahkan berinteraksi dengan keluarga maupun orang lain.

Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat berkontribusi untuk mendukung iklim kerja yang kondusif sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Guna memastikan hal ini, peran pegawai sangatlah penting. Oleh karena itu Bank melibatkan pegawai dalam strategi dan kebijakan terkait K3, diantaranya mencakup:

- a. Memastikan fasilitas kantor dalam kondisi sangat baik
- b. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman mengenai budaya K3
- c. Meningkatkan peran dan fungsi semua sektor dalam pelaksanaan K3.

Disamping memperhatikan lingkungan kerja yang aman dan sehat dan keselamatan kerja (K3) kepada seluruh pegawai, Bank juga tetap memperhatikan lingkungan masyarakat sekitar yang terkena bencana alam seperti banjir bandang yang terjadi di Aceh Sumatera dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak dari banjir bandang tersebut.

**3.****Profil Bank****Informasi Umum Perusahaan**

Nama Perusahaan	PT BPR SYARIAH INGIN JAYA
Alamat	Jl. Banda Aceh - Medan Km.9 No.5 Telp. 06518070092-8070093 Fax. 06518070198 Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar 23371
Nomor Telepon	06518070092
Email	bprsinginjaya@gmail.com
Website	www.bankinginjaya.co.id

Skala Usaha Bank**Total Aset dan Kewajiban**

Jumlah aset di tahun 2025 sebesar Rp 44.624.704.756. Demikian juga dengan kewajiban di tahun 2025 sebesar Rp 33.092.754.823.

Deskripsi	2025	2024	2023
Aset	44.624.705	43.958.577	47.801.506
Kewajiban	33.092.755	32.631.862	35.725.296

Jumlah pegawai

Sepanjang tahun 2025 Bank memiliki SDM total 52 personal yang terdiri dari Pengurus dan Pegawai dengan besaran gaji minimal sesuai upah minimum Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Demografi secara rinci menjadi lampiran dalam Laporan keberlanjutan ini.

Persentasi Kepemilikan Saham

No	Nama	Nominal	Proporsi
1	Bahrum Harun	1,650,000,000	26,68%
2	Razali Ibrahim	1,200,000,000	19,40%
3	Khairul Melody	500,000,000	8,08%
4	Hilmiati	500,000,000	8,08%
5	Amna	400,000,000	6,47%
6	Lain-Lain	1,935,000,000	31,29%



Produk dan Layanan

Produk

Jenis Produk	Deskripsi
Tabungan	1. Tabungan Jaya
	2. Tabungan Bina Usaha
	3. Tabungan Student Save
	4. Tabungan Haji
	5. TabKu
Deposito	1. Deposito
Pembiayaan	1. Pembiayaan Modal Kerja
	2. Pembiayaan Investasi
	3. Pembiayaan Konsumsi
	4. Pembiayaan Mikro Kelompok

Profil Singkat dan Nilai Keberlanjutan Bank

a. Visi Keberlanjutan

Bank Professional dalam menciptakan dan mengembangkan Ekonomi Masyarakat Kecil dan Usaha Mikro dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

b. Misi Keberlanjutan

1. Mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat



LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2025

PT. BPR Syariah Ingin Jaya

Website: bankinginjaya.co.id, Email: bprs_InginJaya@yahoo.com

2. Pengembangan kapasitas internal Bank yang sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan
3. Membangun Tata Kelola dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup

c. Keanggotaan Pada Asosiasi Regional hingga Nasional

- Anggota Perbarindo (Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat)
- Anggota Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo)
- Anggota Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia (Himbarisi)

Penjelasan Lainnya

PT. BPR Syariah Ingin Jaya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

**4.****Penjelasan Direksi****Penjelasan Direksi****Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan**

Bank berkomitmen untuk menerapkan nilai- nilai keberlanjutan dengan menjadi Bank yang terpercaya dan unggul dalam memberikan kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Nilai keberlanjutan tersebut diimplementasikan melalui strategi utama dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang selaras dengan kebutuhan strategis, integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko, serta peningkatan pertumbuhan portofolio kredit atau pembiayaan pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan, khususnya sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Sektor UMKM merupakan usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu, dan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia khususnya menyerap tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.



**Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

Sebagai upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), BPR Syariah menetapkan RAKB dengan rencana 5 (lima) tahun sebagai Rencana Aksi dalam Jangka Panjang. Selain itu, Bank juga memiliki Rencana Aksi dalam Jangka Pendek (satu tahun) yang ditetapkan di tahun 2025.

Target yang ditetapkan oleh Bank yaitu pegawai telah mengikuti sosialisasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan menerapkan operasional perbankan hijau.

Laporan Keberlanjutan ini berisi komitmen, strategi dan kinerja pencapaian kami terkait Keuangan Berkelanjutan. Adapun komitmen kami adalah:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha terutama dalam pemberian kredit.
2. Menjalankan operasional perusahaan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
3. Pengembangan kompetensi staf pada pemahaman terhadap sosial dan lingkungan hidup serta penerapannya dalam setiap kegiatan usaha bank.
4. Menerapkan perbankan yang inklusif dengan menyediakan dukungan akses keuangan bagi segenap masyarakat .
5. Berpartisipasi dalam upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Strategi Pencapaian Target**

Bank senantiasa meningkatkan strategi- strategi keberlanjutan khususnya dalam memitigasi risiko yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan usaha Bank. Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, BPR Syariah tidak terlepas dari berbagai risiko di antaranya risiko pada aspek



ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun, risiko tersebut telah dikelola secara optimal oleh Bank dengan berbagai upaya mitigasi yang dilakukan.

Tantangan utama saat ini di awal peletakan pondasi batu pertama keuangan berkelanjutan adalah komunikasi dan membuat para pemangku kepentingan sadar akan pentingnya penerapan keuangan berkelanjutan dalam operasional dan bisnis perusahaan. Namun demikian, kami sangat percaya bahwa ke depannya terdapat peluang penyaluran dana yang besar terkait dengan Keuangan Berkelanjutan.

Selama tahun 2025, PT. BPR Syariah Ingin Jaya belajar untuk menjadi lebih baik dalam layanan keuangan berkelanjutan. Kami berharap adanya kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah, regulator dan asosiasi untuk menciptakan nilai tambah bagi ekonomi, lingkungan dan sosial dalam upaya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

PT. BPR Syariah Ingin Jaya kedepannya akan terus menargetkan implementasi keuangan berkelanjutan, antara lain peningkatan pengetahuan semua jenjang organisasi mengenai keuangan berkelanjutan, menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada lingkungan dan sosial dalam operasional keseharian, mengembangkan produk keuangan berkelanjutan dan pada akhirnya meningkatkan portofolio produk keuangan berkelanjutan.

Dalam merealisasikan keuangan berkelanjutan, perlu adanya harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta permasalahan lingkungan lainnya yang menjadi tanggung jawab kita semua. Kami berpartisipasi memberikan kontribusi dalam mengurangi dampak negatif lingkungan dan sosial dari dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional dan bisnis kami.



**Apresiasi**

PT. BPR Syariah Ingin Jaya memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bersama-sama berkontribusi dalam penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan di PT. BPR Syariah Ingin Jaya. Dukungan dan rasa percaya yang diberikan kepada kami, menjadi kekuatan kami untuk mampu memberikan dan menciptakan nilai keberlanjutan bagi semua pihak. Harapan kami adalah seluruh pemangku kepentingan dapat terus memberikan dukungan serta kerja samanya agar kami mampu tumbuh secara berkelanjutan dan kerjasama yang baik dalam mengelola isu-isu keberlanjutan.

Tantangan Internal**Permasalahan Yang Dihadapi Dari Sisi Internal****1. Fokus Bisnis Bank**

Masalah utama di sini adalah ketidaksesuaian arah bisnis dengan konsep keberlanjutan adalah orientasi jangka pendek. BPR Syariah lebih fokus pada pembiayaan mikro dan perputaran cepat, sementara proyek berkelanjutan butuh waktu panjang. BPR Syariah pada umumnya mengandalkan model bisnis berbasis pembiayaan mikro (UMKM kecil, pedagang, konsumsi rumah tangga). Tenor pendek (3-12 bulan, maksimal beberapa tahun) dan juga perputaran dana yang cepat (high turnover).

Kegiatan usaha keuangan berkelanjutan seperti energi terbarukan (panel surya, biogas), pertanian organik dan pengelolaan limbah memiliki karakteristik tenor panjang (bisa 5-15 tahun), payback period lama (balik modal tidak cepat) dan ketergantungan pada faktor eksternal (cuaca, teknologi, regulasi).

Implikasi bagi BPR Syariah:

- Terjadi *mismatch* antara sumber dana jangka pendek dengan kebutuhan pembiayaan jangka panjang
- Risiko likuiditas meningkat jika bank memaksakan pembiayaan jangka panjang
- Bank cenderung menolak proyek berkelanjutan karena tidak sesuai dengan struktur aset-liabilitas
- Portofolio masih terkonsentrasi pada perdagangan dan konsumtif, bukan sektor hijau.
- Target laba jangka pendek sering lebih diutamakan dibanding dampak sosial/lingkungan.
- Produk berkelanjutan belum menjadi core business, hanya pelengkap.



2. Operasional Bank

Tantangan operasional berkaitan dengan kesiapan sistem dan proses kerja.

a. Belum ada SOP berbasis keberlanjutan

Proses pembiayaan belum memasukkan analisis risiko lingkungan dan sosial. Secara umum, Standar Operasional Prosedur (SOP) BPR Syariah masih berfokus pada analisis kelayakan finansial (cash flow, jaminan, kemampuan bayar) dan kepatuhan syariah (akad, objek halal). Masalahnya ialah belum ada integrasi aspek risiko lingkungan (misalnya pencemaran, penggunaan sumber daya) dan risiko sosial (dampak terhadap masyarakat sekitar, tenaga kerja). Akibatnya pembiayaan bisa saja diberikan kepada usaha yang merusak lingkungan, dan tidak berkelanjutan secara sosial. Bank tidak memiliki filter untuk mengarahkan pembiayaan ke sektor hijau

b. Sistem IT terbatas

Belum tersedia tools untuk tracking dampak lingkungan dan pelaporan ESG. Implementasi keuangan berkelanjutan membutuhkan dukungan teknologi untuk mengumpulkan data dampak pembiayaan memantau performa lingkungan nasabah, serta menyusun laporan keberlanjutan (ESG reporting). Kondisi di BPR Syariah saat ini Sistem IT masih sederhana, hanya berfokus pada pencatatan transaksi dan laporan keuangan dasar. Adapun Keterbatasan yang muncul yaitu tidak ada sistem untuk tracking dampak lingkungan (misalnya pengurangan emisi, efisiensi energi) serta pelaporan ESG yang terstruktur.

Dampak:

- Bank tidak bisa mengukur “impact” dari pembiayaan
- Sulit memenuhi tuntutan regulator atau investor terkait transparansi
- Data untuk pengambilan keputusan strategis menjadi terbatas
- Biaya operasional tinggi, untuk proyek kecil (UMKM hijau), biaya monitoring relatif besar dibanding nilai pembiayaan.
- Belum adaptif terhadap kebutuhan sektor seperti energi terbarukan atau pertanian berkelanjutan.

3. Kebijakan Internal

• Belum ada roadmap keuangan berkelanjutan

Roadmap adalah peta jalan strategis yang memuat tujuan jangka pendek, menengah, dan Panjang, target implementasi, dan tahapan transformasi menuju keuangan berkelanjutan. Adapun kondisi di BPR Syariah saat ini ialah banyak yang belum memiliki dokumen formal terkait sustainability. Jika ada, masih bersifat umum dan belum operasional. Dampak ialah Inisiatif keberlanjutan berjalan sporadis (tidak



terstruktur), sulit mengukur progres atau keberhasilan dan setiap unit kerja bisa memiliki pemahaman berbeda.

- **KPI belum berbasis ESG**

Kinerja masih diukur dari indikator keuangan saja. Selama ini, Key Performance Indicator (KPI) di BPR Syariah umumnya hanya mencakup pertumbuhan pembiayaan, laba (profitability), kualitas aset (NPF) dan efisiensi operasional.

Yang belum ada indikator berbasis *ESG (Environmental, Social, Governance)* seperti persentase pembiayaan hijau, dampak sosial dari pembiayaan dan kepatuhan terhadap prinsip lingkungan. Dampaknya adalah sustainability tidak menjadi prioritas dalam pengambilan Keputusan serta program keberlanjutan sulit berkembang karena tidak diukur.

- **Kurangnya regulasi internal**

Regulasi internal berfungsi sebagai pedoman operasional yang lebih teknis. Dalam konteks keberlanjutan, banyak BPR Syariah belum memiliki:

- a. Daftar Sektor Prioritas Hijau yaitu daftar sektor yang didorong untuk dibiayai, seperti energi terbarukan, pertanian organik dan pengelolaan limbah.
- b. Pembatasan Sektor Berdampak Negatif
Seharusnya ada kebijakan untuk membatasi atau menghindari pembiayaan pada sektor yang merusak lingkungan dan berdampak sosial negative.
- c. Pedoman Teknis ESG seperti cara menilai risiko lingkungan, standar evaluasi dampak sosial dan prosedur monitoring keberlanjutan.

- **Komitmen manajemen belum kuat**

Keberlanjutan belum menjadi bagian dari visi inti. Transformasi menuju keuangan berkelanjutan sangat bergantung pada arah dan dukungan dari top management. Adapun kondisi yang sering terjadi:

- Keberlanjutan belum masuk dalam visi dan misi utama dan strategi bisnis inti.
- Masih dianggap sebagai tren sementara dan kewajiban regulasi (compliance), bukan peluang bisnis. Dampaknya ialah program keberlanjutan hanya formalitas, tidak terintegrasi dalam keputusan strategis dan inovasi menjadi minim.

4. Keahlian SDM Bank

- **Literasi ESG rendah**

Pegawai belum memahami konsep keuangan berkelanjutan dan risiko lingkungan & sosial. Sebagian besar pegawai BPR Syariah masih terbiasa dengan pendekatan konvensional dalam pembiayaan, yaitu fokus pada analisis keuangan (cash flow, agunan, kemampuan bayar) dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dasar (akad dan kehalalan usaha).



Pemahaman tentang konsep *ESG (Environmental, Social, Governance)* masih terbatas, terutama terkait bagaimana menilai dampak lingkungan dari suatu usaha, mengidentifikasi risiko sosial (misalnya eksploitasi tenaga kerja, konflik masyarakat) dan bagaimana mengaitkan pembiayaan dengan tujuan keberlanjutan.

Adapun dampak yang di hadapi ialah:

- pegawai tidak memasukkan faktor ESG dalam analisis pembiayaan
- eputusan pembiayaan hanya berbasis profit dan risiko finansial
- Sulit mengarahkan portofolio ke sektor berkelanjutan

- **Kurangnya kemampuan analisis proyek hijau**

Proyek berkelanjutan memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha konvensional, seperti berbasis teknologi (contoh: panel surya, biogas), memiliki model bisnis baru dan membutuhkan analisis teknis tambahan.

Kendala SDM adalah tidak memiliki kompetensi untuk menilai kelayakan teknis energi terbarukan, memahami siklus bisnis pertanian organik, dan menganalisis efisiensi energi atau dampak lingkungan. Akibatnya proyek hijau sering dianggap terlalu rumit, berisiko tinggi dan tidak layak dibiayai. Dampak yang terjadi banyak peluang pembiayaan berkelanjutan tidak dimanfaatkan dan Bank tertinggal dalam masuk ke sektor ekonomi hijau.

- **Minim pelatihan khusus**

Program peningkatan kapasitas masih terbatas. Pengembangan kapasitas SDM sangat bergantung pada program pelatihan. Namun pada banyak BPR Syariah pelatihan masih fokus pada produk perbankan, kepatuhan syariah dan manajemen risiko tradisional. Pelatihan terkait keberlanjutan masih jarang, belum terstruktur dan belum menjadi program rutin. Akibatnya tidak ada peningkatan kompetensi secara sistematis, dan pegawai tidak memiliki pengetahuan terbaru tentang tren keuangan berkelanjutan serta kemampuan praktis dalam implementasi ESG masih minim.

- **Kurangnya tenaga ahli**

Tidak ada spesialis sustainability di dalam organisasi. Dalam implementasi keuangan berkelanjutan, idealnya bank memiliki sustainability officer, analis ESG dan tim khusus yang menangani pembiayaan hijau. Namun pada BPR Syariah saat ini struktur organisasi masih sederhana dan belum ada posisi khusus terkait sustainability. Adapun masalah yang akan timbul tidak ada pihak yang memimpin inisiatif keberlanjutan, mengembangkan kebijakan ESG dan melakukan evaluasi dampak. Akibatnya program keberlanjutan tidak terkoordinasi, tanggung jawab tersebar tanpa kejelasan dan inovasi produk dan kebijakan menjadi minim.



5. Lainnya

Adapun permasalahan yang dihadapi dari sisi internal lainnya yaitu:

- Manajemen Risiko, fokus pada risiko finansial saja sedangkan Risiko lingkungan dan sosial belum terintegrasi. Tidak ada tools pengukuran ESG risk, penilaian risiko masih tradisional, serta persepsi risiko tinggi pada proyek hijau, membuat bank cenderung menghindari sektor tersebut.
- Inovasi Produk dan Layanan, produk hijau masih minim seperti pembiayaan energi terbarukan, dan usaha ramah lingkungan. Kurangnya riset pasar Bank belum memahami kebutuhan nasabah terkait sustainability. Model bisnis belum adaptif. Skema pembiayaan belum disesuaikan dengan karakter proyek berkelanjutan.
- Budaya Organisasi, mindset belum sustainability-oriented, fokus masih pada profit, bukan impact. Perubahan organisasi lambat. Adaptasi terhadap tren global masih terbatas. Dan kurangnya internal awareness, dimana keberlanjutan belum dipahami sebagai peluang bisnis.
- Kapasitas Modal, modal terbatas, sulit mendanai proyek besar atau jangka panjang, akses pendanaan terbatas, dan tidak mudah mendapatkan sumber dana khusus untuk pembiayaan hijau.

Upaya Yang Dilakukan

Beberapa upaya yang harus dilakukan diantaranya ialah:

- Menyusun arah strategis (roadmap keuangan berkelanjutan)
- Mengubah Fokus Bisnis Secara Bertahap
- Mengembangkan Produk Pembiayaan Berkelanjutan
- Memperkuat SOP dan Proses Operasional
- Penguatan Sistem dan Teknologi (IT)
- Peningkatan Kapasitas SDM
- Membentuk Tim atau Penanggung Jawab Sustainability
- Membangun Budaya Organisasi Berbasis Keberlanjutan.



Tantangan Eksternal

Permasalahan Yang Dihadapi Dari Sisi Eksternal

1. Kebijakan Pemerintah

a. Regulasi yang terus berkembang

Pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia terus mendorong implementasi keuangan berkelanjutan (sustainable finance), termasuk pelaporan ESG (Environmental, Social, Governance). Namun regulasi sering berubah dan berkembang cepat, sehingga BPR Syariah kesulitan menyesuaikan sistem pelaporan.

b. Beban kepatuhan (compliance burden)

Kewajiban pelaporan tambahan meningkatkan biaya operasional. BPR Syariah dengan skala kecil memiliki keterbatasan SDM dan sistem untuk memenuhi seluruh ketentuan.

2. Perekonomian Nasional, Regional, dan Global

a. Nasional

Ketidakstabilan ekonomi nasional seperti inflasi, suku bunga, dan daya beli masyarakat sangat mempengaruhi kinerja pembiayaan BPR Syariah. Nasabah utama BPR Syariah (UMKM dan masyarakat kecil) sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi.

b. Perekonomian Regional

Ketergantungan pada sektor tertentu, ekonomi daerah seperti Aceh masih banyak bergantung pada pertanian, perdagangan kecil dan UMKM tradisional. Sektor ini rentan terhadap perubahan cuaca dan pasar. Kemudian juga keterbatasan infrastruktur digital dan ekonomi yang belum merata menyulitkan pengumpulan data ESG dan digitalisasi laporan keuangan berkelanjutan.

c. Perekonomian Global

Standar ESG internasional yang terus berubah, perubahan standar global ini menuntut BPR Syariah untuk selalu menyesuaikan diri. Tekanan investor global, investor global kini lebih memilih lembaga keuangan yang transparan, ramah lingkungan, dan memiliki laporan ESG lengkap. BPR Syariah kecil sering kesulitan memenuhi ekspektasi ini. Digitalisasi global, saat ini dunia bergerak ke arah digital ESG reporting system BPR Syariah yang belum sepenuhnya digital tertinggal dalam integrasi data dan otomatisasi pelaporan.



3. Faktor Eksternal Lainnya

- Perkembangan teknologi informasi
- Tekanan dari stakeholder
- Persaingan industri keuangan

Upaya utama BPR Syariah dalam menghadapi tantangan eksternal adalah:

- Adaptasi regulasi dan standar ESG
- Digitalisasi sistem pelaporan
- Peningkatan literasi dan kualitas data nasabah
- Manajemen risiko ekonomi dan lingkungan
- Kolaborasi dengan regulator, teknologi, dan stakeholder.

**5.****Tata Kelola Keberlanjutan****Struktur Tata Kelola Keberlanjutan**

Tata Kelola yang Baik (GCG – *Good Corporate Governance*) bagi Bank merupakan suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan 5 (lima) Pilar Tata Kelola, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Selain itu, GCG merupakan prinsip– prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang– undangan dan etika perbankan.

Struktur tata kelola perusahaan PT. BPR Syariah Ingin Jaya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPR Syariah Ingin Jaya Nomor. 2/SK–DIR/1/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Kebijakan Penerapan Tata kelola Perusahaan yang Baik, adalah sebagai berikut:

1. RUPS: adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang– Undang dan/ atau Anggaran dasar.
2. Dewan Komisaris; adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar.

Dalam penerapan *good corporate governance*, Perseroan telah memiliki kerangka kerja (*frame work*) yang menggabungkan tiga hal yaitu Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*) dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*). Kerangka kerja dan operasional ini diharapkan mampu memberikan hasil berupa perwujudan ekspektasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara berkesinambungan.

1. Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan

mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang– undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:



1. Memberikan persetujuan atas Kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang merupakan salah satu kebijakan spesifik Bank.
2. Memberikan persetujuan terhadap RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)
4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.

2. Direksi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi terkait dengan penerapan program Keuangan Berkelanjutan mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengusulkan rancangan kebijakan Keuangan Berkelanjutan berikut perubahannya kepada Dewan Komisaris.
2. Menyusun dan mengusulkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) kepada Dewan Komisaris.
3. Menyusun dan mengusulkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) kepada Dewan Komisaris.
4. Mengkomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.
5. Memantau satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Keuangan Berkelanjutan.

Sebagai BPR Syariah (Bank Perekonomian Rakyat Syariah) yang memiliki modal inti di bawah Rp 50 milyar, PT. BPR Syariah Ingin Jaya berkomitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51 / POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Penerapan keuangan berkelanjutan di PT. BPR Syariah Ingin Jaya secara umum menjadi tanggung jawab Direktur Utama sebagai pemimpin tertinggi di PT. BPR Syariah Ingin Jaya. Namun, dalam pelaksanaannya, Direktur Utama telah menugaskan Direktur Yang Membawahkan Fungsi (YMF) Kepatuhan yang membawahi Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai koordinator Tim Implementasi Keuangan Berkelanjutan yang bertugas melakukan penyusunan, monitoring, dan penyampaian atas penerapan keuangan berkelanjutan.

Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan penyampaian hasil pelaksanaan atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam bentuk Laporan Keberlanjutan dilakukan oleh Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Koordinator Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan.



Adapun tugas dan tanggung jawab **Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan** adalah sebagai berikut:

Ketua (Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan):

1. Memastikan bahwa Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan dan Unit Kerja Pengelola telah melaksanakan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bersama- sama dengan Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan merekomendasikan hasil penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan hasil pemantauan Keuangan Berkelanjutan kepada Direksi sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris.

Koordinator (Bagian Kepatuhan dan Manajemen Kepatuhan):

1. Melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan dan seluruh anggota Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan serta Unit Kerja terkait hal- hal sebagai berikut: (a) Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB); (b) Pemantauan penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan (c) Penyusunan Laporan Berkelanjutan;
2. Menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tugas dan tanggung jawab tersebut pada butir (i) di atas kepada Ketua Tim, Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
3. Menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Berkelanjutan sebelum batas akhir penyampaian sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan

Pembekalan dilakukan melalui pemberian pelatihan yang dilakukan pada bulan Februari tahun 2025 dan dihadiri oleh seluruh anggota Tim. Materi yang disampaikan mencakup prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan kategori kegiatan yang tergolong sebagai KUB. Dengan demikian, Bank berharap dapat mengembangkan portofolio produk yang termasuk dalam kategori KUB di masa mendatang.

1. Sosialisasi Keuangan Berkelanjutan Tahap 1 sesuai POJK No. 51 yang dilakukan oleh Bagian Kepatuhan kepada SDM pada tanggal 02 Februari 2025 yang diikuti oleh 46 orang.
2. Sosialisasi program kerja implementasi keuangan berkelanjutan kepada seluruh SDM pada tanggal 5 Maret 2025 yang diikuti 46 orang.





Identifikasi Risiko Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Bank berupaya untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko terkait aspek lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko Bank, melalui penyusunan kebijakan pembiayaan maupun prosedur terkait portofolio produk yang termasuk dalam Kategori Usaha Berkelanjutan (KUB). Kebijakan dan prosedur tersebut telah menjadi bagian dari rencana strategis keuangan berkelanjutan Bank yang ditargetkan dapat tersedia pada tahun 2025.

Untuk memastikan setiap program dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, Bank akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Bank mengidentifikasi pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan pengaruh dan dampaknya terkait keuangan berkelanjutan.

Peluang dan Tantangan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Kesadaran mengenai prinsip keuangan berkelanjutan telah menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi dalam implementasi dan praktiknya selama tahun 2025 sehingga diperlukan ditingkatkan konsistensi pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Disisi lain, Bank mengidentifikasi adanya peluang dalam pembiayaan berkelanjutan terutama untuk melayani segmen ritel dan UMKM untuk mendorong akselerasi usaha berwawasan lingkungan di masyarakat.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua penerapan keuangan berkelanjutan di PT. BPR Syariah Ingin Jaya. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Kesadaran karyawan. PT. BPR Syariah Ingin Jaya di tahun 2025 sudah kedua kali menerapkan keuangan berkelanjutan masih fokus pada pengembangan pengetahuan dan kesadaran penerapan keuangan berkelanjutan kepada seluruh pegawai.
2. Penerapan keuangan berkelanjutan juga membutuhkan kerja sama dan dukungan penuh dari Pemerintah setempat, pelaku bisnis dan masyarakat
3. Kesadaran nasabah dan pemangku kepentingan juga diperlukan untuk mendukung dan menerapkan keuangan berkelanjutan. Pengembangan organisasi, produk dan kebijakan internal yang perlu disusun dan dikembangkan memerlukan waktu dan pengetahuan yang cukup terkait Keuangan Berkelanjutan.



6.

Kinerja Keberlanjutan

1. Kinerja Ekonomi

Tabel 6.1.1. Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi

Nominal uang dalam jutaan rupiah

Keterangan	2025	2024	2023
Kinerja Keuangan			
Total Aset	44.624.704.756	43.958.576.830	47.801.506.277
Aset Produktif	34.090.770.138	34.704.794.468	44.621.012.896
Kredit/Pembiayaan Bank	26.945.073.311	29.650.749.583	33.337.238.229
Dana Pihak Ketiga	30.701.918.492	29.139.603.707	29.678.493.771
Pendapatan Operasional	2.833.666.288	8.355.885.995	8.636.182.082
Beban Operasional	2.054.109.059	6.676.882.816	6.331.336.451
Laba Bersih	847.220.835	1.416.188.120	2.311.505.700
Rasio Kinerja (Dalam %)			
Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPM)%	44,32%	50,95%	46,38%
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif%	9,50%	14,54%	10,36%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif%	11,47%	10,85%	7,01%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap aset produktif%	100%	100%	100%
NPF gross%	14,51%	12,70%	9,39%
NPF nett%	12,12%	7,12%	5,34%
Return on Asset (ROA)%	4,76%	3,47%	4,88%
Return on Equity (ROE)%	14,27%	27,16%	37,37%
Net Imbalan (NI)%	4,40%	15,87%	17,11%
Rasio Efisiensi (BOPO)%	72,59%	79,67%	73,61%
Financing to Deposit Ratio (FDR)%	60,19%	70,78%	79,10%
Cash Ratio	35,19	4,04	6,44



LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2025

PT. BPR Syariah Ingin Jaya

Website: bankinginjaya.co.id, Email: bprs_InginJaya@yahoo.com

Terdapat peningkatan aset PT. BPR Syariah Ingin Jaya di sepanjang tahun 2025 jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan terjadi penurunan laba di tahun 2025 dikarenakan PT. BPR Syariah Ingin Jaya baru konversi dari Konvensional menjadi Syariah per 1 September 2025 dan untuk semua pencatatan transaksi keuangan di mulai dari awal.

Tabel 6.1.2. Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Nominal uang dalam jutaan rupiah

Keterangan	2025	2024	2023
Jumlah produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan			
Penghimpunan Dana (Rp)	30.701.918.492	29.139.603.707	29.678.493.771
Penyaluran Dana (Rp)	26.945.073.311	29.650.749.583	33.337.238.229
Total Aset Produktif Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	34.090.770.138	38.237.761.075	41.491.172.815
Total Kredit/Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	26.945.073.311	29.650.749.583	33.337.238.229
Total Non-Kredit/Pembiayaan Non-Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	0	0	0
Persentase total kredit/pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit/pembiayaan (%)	100	100	100

Penghimpunan dana mengalami penurunan di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Namun, pada tahun 2025 penghimpunan dana mengalami kenaikan sebesar Rp. 30.701.918.492.





2. Kinerja Sosial

Komitmen Perusahaan

PT. BPR Syariah Ingin Jaya memberikan layanan merata kepada seluruh nasabah tanpa memandang kelas pendapatan masyarakat.

Kinerja Sosial Terhadap Ketenagakerjaan

PT. BPR Syariah memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai dengan memberikan pengupahan/ penggajian sesuai dengan standar UMK (Upah Minimum Kabupaten/ Kota) di Kabupaten Aceh Besar.

Kinerja Sosial Terhadap Masyarakat

PT. BPR Syariah Ingin Jaya ikut berkontribusi memberikan sebagian dari laba yang disisihkan untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

3. Kinerja Lingkungan Hidup

Kegiatan Internal dan Kegiatan TJSL



PT. BPR Syariah Ingin Jaya mewujudkan operasional bank ramah lingkungan dengan menerapkan berbagai kebijakan sesuai prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Sosialisasi atas prinsip-prinsip ini terus dilakukan agar tujuan awal yang ditetapkan Perusahaan tercapai. Operasional kantor yang ramah lingkungan diwujudkan melalui pengelolaan bahan baku/ material, energi, dan air agar semua bisa lebih efisien. Dengan upaya itu, maka selama tahun pelaporan, operasional PT. BPR Syariah Ingin Jaya tidak membawa dampak buruk bagi keanekaragaman hayati di lingkungan BPRS.

Dukungan Pada Kelestarian Lingkungan Hidup Bagi Bank

Perusahaan juga menerapkan penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan termasuk mengganti penggunaan gelas plastik dengan *tumbler* yang disiapkan pegawai masing-masing.

**Tabel 6.3.1. Uraian Penggunaan Energi**

Keterangan	Penggunaan Pada Tahun Laporan
Listrik (kWh)	58.000
Volume Air dari PDAM (meter kubik)	17,50
Volume Air dari Sumur (meter kubik)	0

4. Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Inovasi dan Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Sebagai entitas bisnis, PT. BPR Syariah Ingin Jaya senantiasa berupaya agar eksistensinya semakin maju dan berkembang. Salah satunya adalah dengan melakukan inovasi dan pengembangan produk dan layanan dengan memperhatikan perkembangan teknologi terkini yang sangat pesat sebagai faktor pendorong pergeseran perilaku masyarakat modern yang menginginkan kemudahan, rasa aman dan kenyamanan dalam bertransaksi perbankan.

Dalam melakukan inovasi, PT. BPR Syariah Ingin Jaya melakukannya dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan kebijakan perusahaan. Adapun inovasi dan pengembangan produk/ jasa yang dilakukan PT. BPR Syariah Ingin Jaya selama tahun 2025 antara lain meluncurkan Program Pembiayaan PT. BPR Syariah Ingin Jaya, dan Tabungan.

Selain itu, Perusahaan juga mengembangkan program pembiayaan Scoring, program Pembuatan Aplikasi Monitoring pembiayaan, dan Pengembangan Web Based Laporan Tahunan bekerja sama dengan Vendor.

Jumlah dan Persentase Produk dan Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan

Semua produk dan jasa yang ditawarkan PT. BPR Syariah Ingin Jaya telah memenuhi semua persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga telah teruji keamanannya bagi nasabah. Selaras dengan itu, untuk menekan risiko kerugian seminimal mungkin atas produk dan jasa tersebut, Perseroan secara kontinue menyampaikan informasi atas semua risiko yang mungkin terjadi kepada nasabah, seperti risiko pasar dan risiko fluktuasi mata uang. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai saluran, formulir Ringkasan Informasi Produk dan layanan (RIPLAY) maupun secara tatap muka.

Sejalan dengan itu, sesuai regulasi yang ada, PT. BPR Syariah Ingin Jaya juga melakukan kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan secara berkala sehingga calon nasabah atau nasabah mendapatkan pemahaman yang benar tentang produk/ jasa yang ditawarkan Perseroan. Dengan demikian, mereka akan melakukan investasi sesuai kebutuhan dan telah mengetahui profil risiko yang melekat di dalam produk/jasa tersebut.



Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan

PT. BPR Syariah Ingin Jaya telah melakukan penilaian terhadap setiap produk/ jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan dan mengacu pada Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, maka PT. BPR Syariah Ingin Jaya akan memberikan dana dengan memegang prinsip kehati-hatian, termasuk mencegah risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Upaya itu membawa hasil dengan tidak adanya dampak negatif atas produk dan jasa yang dikeluarkan PT. BPR Syariah Ingin Jaya pada tahun pelaporan.

Jumlah Produk yang Ditarik Kembali dan Alasannya

Tidak ada produk yang ditarik atas pertimbangan internal PT. BPR Syariah Ingin Jaya maupun perintah dari regulator (OJK).

Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

PT. BPR Syariah Ingin Jaya belum melakukan survey terhadap kepuasan pelanggan terhadap produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan, namun di sepanjang tahun 2025 tidak ada komplain dari nasabah atau masyarakat terhadap produk dan jasa Bank yang merusak lingkungan hidup dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.



7.

Verifikasi Dan Pemangku Kepentingan

1. Verifikasi Pihak Independen

■ Verifikator Laporan Keberlanjutan

Verifikasi pihak independen terhadap laporan keberlanjutan adalah proses penilaian yang dilakukan oleh organisasi eksternal (tidak terafiliasi dengan perusahaan yang menyusun laporan) untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat, kredibel, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Ini penting karena laporan keberlanjutan sering digunakan oleh investor, regulator, dan publik untuk menilai kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Adapun yang melakukan verifikasi laporan keberlanjutan adalah kantor akuntan public dan pihak otoritas.

■ Verifikator Lembaga Penghitung Emisi

Verifikator lembaga penghitung emisi adalah pihak independen yang bertugas memeriksa, memvalidasi, dan memberikan assurance atas perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dilakukan oleh suatu organisasi atau proyek. Peran ini sangat penting dalam konteks pelaporan karbon, perdagangan karbon, dan target net-zero. Dalam hal ini yang melakukan verifikator lembaga penghitung emisi adalah Lembaga Sertifikasi Internasional (SGS), Kantor akuntan / konsultan, dan Lembaga Nasional yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

■ Konsultan Lainnya

Tidak semua konsultan boleh bertindak sebagai verifikator itu batas pentingnya. Verifikasi laporan keberlanjutan hanya boleh dilakukan oleh pihak yang independen dari proses penyusunan laporan. Adapun pihak konsultan lain yang melakukan verifikator adalah Konsultan Assurance ESG, Konsultan Verifikasi Teknis (Technical Verification Bodies), Konsultan Spesialis ESG Independen, Konsultan Berbasis Standar AA1000 dan Konsultan Lokal Terakreditasi.

2. Pihak Pemangku Kepentingan

1. Pemegang Saham

- Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan luar biasa (RUPST dan RUPSLB).
- Pemberian laporan-laporan: Laporan Tata Kelola, Laporan Publikasi Triwulanan dan Tahunan Audit, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Berkelanjutan.

2. Pemerintah

- Membuat aturan dan kebijakan.



- b. mengawasi kepatuhan Perusahaan.
- 3. Otoritas
 - a. Pemeriksaan tingkat kepatuhan.
 - b. Penyampaian laporan-laporan.
 - c. Penyusunan rencana bisnis.
- 4. Akademisi
 - a. Dosen dan peneliti dari universitas.
 - b. Pakar di bidang lingkungan, sosial, dan tata Kelola.
 - c. Institusi pendidikan dan riset (misalnya fakultas ekonomi, lingkungan, teknik).
- 5. Praktisi
 - a. Profesional industri (ESG manager, sustainability officer).
 - b. Konsultan ESG.
 - c. Auditor/verifikator.
 - d. Pelaku operasional (misalnya manajer pabrik, supply chain).
- 6. Pegawai
 - a. Rapat internal sewaktu-waktu.
 - b. Penyusunan laporan-laporan rutin.
 - c. Training dan workshop.
 - d. Evaluasi kerja dan kenaikan jabatan.
 - e. Proses kerja harian.
- 7. Nasabah
 - a. Aktivitas transaksi perbankan.
 - b. Survei tingkat kepuasan layanan.
 - c. Kegiatan edukasi literasi dan inklusi keuangan.
 - d. Pengaduan nasabah.
- 8. Lainnya
 - Mitra Bisnis & Masyarakat
 - Kerja sama sesuai kebutuhan.
 - Pertemuan bisnis.



Umpan Balik

Untuk terwujudnya komunikasi dua arah sekaligus penerapan evaluasi PT. BPR Syariah Ingin Jaya yang bertujuan meningkatkan kualitas Laporan di masa mendatang, PT. BPR Syariah Ingin Jaya menyediakan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir Laporan Keberlanjutan ini. Dengan lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan.

PT. BPR Syariah Ingin Jaya memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan, dan investor serta siapa saja yang memberikan umpan balik (*feedback*) mengenai laporan keberlanjutan ini dengan menghubungi:

Ibu Wiwin Utari,SE
Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko

PT BPR Syariah Ingin Jaya
Jl. Banda Aceh – Medan Km. 9,5
Bundaran Lambaro, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar
23371
Telepone : (0651) 8070092
E-mail : bprsinginjaya@gmail.com

Bagi PT. BPR Syariah Ingin Jaya dengan modal inti kurang dari Rp 50 Milyar penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2025 ini merupakan yang kedua kali oleh karenanya belum mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan. Bank akan terus melakukan perbaikan agar dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi segenap pembaca.



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEBERLANJUTAN TAHUN 2025
PT. BPR SYARIAH INGIN JAYA**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2025 telah disusun sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

LAMBARO, 28 April 2026

PT. BPR Syariah Ingin Jaya

Disetujui Oleh,

Hilmiati, SE
Direktur Utama

Diketahui Oleh,

Rika Mulia
Komisaris Utama

**LAPORAN DEMOGRAFI PEGAWAI
PT. BPR SYARIAH INGIN JAYA
TAHUN 2025**

1. Demografi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

No	Level Organisasi	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1.	Kadiv	2	2	4	100%
2.	Kabag	3	3	6	
3.	Staf	25	11	36	

2. Demografi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1.	S1	13	14	27	100%
2.	D3	7	1	8	
3.	SMU	10	1	11	

3. Demografi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1.	Pegawai Tetap	14	4	18	100%
2.	Pegawai Kontrak	16	12	28	

4. Demografi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

No	Rentang Usia	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1.	45-50	2	0	2	100%
2.	40-44	5	2	7	
3.	25-39	23	14	37	

5. Demografi Pegawai Berdasarkan Generasi

No	Generasi	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1.	X	2	0	2	100%
2.	Y	16	5	21	
3.	Z	12	11	23	



Laporan Realisasi Program Kerja Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2025

No	Deskripsi Program Kerja	Rencana Pelaksanaan	Realisasi
1	Penyelenggaraan sosialisasi tentang konsep Keuangan Berkelanjutan Tujuan: Peningkatan awareness (penyadartahuan) tentang Keuangan Berkelanjutan. Indikator Ketercapaian: Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali bagi seluruh pegawai. Sumber Daya yang Dibutuhkan: Dana dan sumber daya manusia Penanggung Jawab: Bagian SDM dan Kepatuhan	01 Jan 2025 s/d 31 Jan 2025	Selesai Dilaksanakan Pada 22 Januari 2025 . Sosialisasi sudah terealisasi dengan semestinya.
2	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup Tujuan: Meningkatkan Awareness tentang Keuangan Berkelanjutan Indikator Ketercapaian: Peningkatan kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar. Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM Penanggung Jawab: Kepatuhan	01 Mar 2025 s/d 31 Mar 2025	Selesai Dilaksanakan Pada 10 Maret 2025 . Sudah terealisasi dengan baik dimana kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar semakin tinggi akan pentingnya menjaga kebersihan.
3	Efisiensi Penggunaan Listrik Tujuan: Mengetahui kebiasaan dalam memanfaatkan energi Indikator Ketercapaian: Penghematan biaya listrik sebesar 10% dibandingkan dengan tahun 2024. Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM Penanggung Jawab: Bagian Umum	01 Apr 2025 s/d 30 Apr 2025	<i>Belum Ada Realisasi Hingga Tanggal 30 April 2025.</i>

24



4	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan Tujuan: Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan Indikator Ketercapaian: Ditunjuknya Unit Kerja yang mengelola dan/ atau mengkoordinasi seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM Penanggung Jawab: Direksi	01 Mei 2025 s/d 31 Mei 2025	Belum Ada Realisasi Hingga Tanggal 26 April 2026.
5	Penyusunan SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan Tujuan: Memiliki SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan Indikator Ketercapaian: SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan telah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM Penanggung Jawab: Bagian Kepatuhan	01 Agt 2025 s/d 31 Agt 2025	Belum Ada Realisasi Hingga Tanggal 26 April 2026.
6	Mengurangi Penggunaan Kertas Tujuan: Penghematan dan mendukung program go green Indikator Ketercapaian: Penghematan penggunaan kertas sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2024. Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM Penanggung Jawab: Bagian Umum dan Kepatuhan	01 Jul 2025 s/d 31 Jul 2025	Selesai Dilaksanakan Pada 16 Juli 2025. Penggunaan kertas mengalami penurunan sebesar 5% dibandingkan tahun 2024



7	Penggunaan Wadah minuman yang ramah lingkungan Tujuan: Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan plastik yang sulit terurai. Indikator Ketercapaian: Penurunan penggunaan air minum kemasan Sumber Daya yang Dibutuhkan: SDM Penanggung Jawab: Bagian Kepatuhan	01 Okt 2025 s/d 31 Okt 2025	Selesai Dilaksanakan Pada 14 April 2025. Sudah terealisasi dimana hampir semua pegawai sudah membawa tumbler masing-masing dan sudah mengurangi penggunaan air minum kemasan.
---	--	--------------------------------	--

Aceh Besar, 31 Desember 2025

PT. BPR Syariah Ingin Jaya

Direksi

HILMIATI.SE
Direktur Utama



PT. BPR Syariah Ingin Jaya
Jln. Banda Aceh-Medan Km. 9 Bundaran Lambaro Kec. Ingin
Jaya Kab. Aceh Besar
Website: bankinginjaya.co.id. Telepon: (0651)8070093.

Terima kasih atas kesediaan Bapak / Ibu / Saudara untuk membaca Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) PT. BPR Syariah Ingin Jaya ini. Guna meningkatkan kualitas dan kelengkapan Laporan Keberlanjutan pada tahun-tahun mendatang kami berharap kesediaan Bapak / Ibu / Saudara untuk mengisi Lembar Umpan Balik yang telah disiapkan di bawah ini, dan mengirimkannya kembali kepada kami.

1. Laporan Keberlanjutan ini telah menyediakan informasi mengenai berbagai hal yang telah dilaksanakan PT. BPR Syariah Ingin Jaya dalam pemenuhan kewajiban terhadap pengaturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Bank.

☒ Setuju

☐ Tidak Setuju

☐ Tidak Tahu

2. Materi Laporan ini telah memberikan informasi yang bermanfaat mengenai aspek kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan hidup pada PT. BPR Syariah Ingin Jaya.

☒ Setuju

☐ Tidak Setuju

☐ Tidak Tahu

3. Materi dalam Laporan Keberlanjutan ini, termasuk data dan informasi yang disajikan sudah cukup lengkap.

☒ Setuju

☐ Tidak Setuju

☐ Tidak Tahu

4. Data dan informasi yang diungkapkan mudah dipahami, lengkap, transparan, dan berimbang.

☒ Setuju

☐ Tidak Setuju

☐ Tidak Tahu

5. Data dan informasi yang disajikan berguna dalam pengambilan keputusan.

☒ Setuju

☐ Tidak Setuju

☐ Tidak Tahu

6. Laporan Keberlanjutan ini menarik dan mudah dibaca.

☒ Setuju

☐ Tidak Setuju

☐ Tidak Tahu

7. Informasi apa saja yang dirasakan kurang dan harus dilengkapi dalam Laporan Keberlanjutan di masa mendatang?

Untuk masa mendatang laporan keberlanjutan diharapkan lebih rinci, detail, dan singkat.

8. Mohon berikan saran dan komentar terhadap Laporan Keberlanjutan ini.

Laporan keberlanjutan sudah bagus dan mudah dipahami oleh pembaca.



PT. BPR Syariah Ingin Jaya
Jln. Banda Aceh-Medan Km. 9 Bundaran Lambaro Kec. Ingin
Jaya Kab. Aceh Besar
Website: bankinginjaya.co.id. Telepon: (0651)8070093.

Profil Anda

Nama : Radinal Alam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Institusi/Perusahaan :
Kontak (telepon, e-mail) : 0813 76 08 0280

Kategori Pemangku Kepentingan

- ☐ Pemerintah ☒ Nasabah ☐ Karyawan ☐ Mitra Usaha
☐ Media ☐ Masyarakat ☐ LSM ☐ Lain-Lain

Saran dan tanggapan yang Anda berikan atas informasi yang disajikan dalam laporan ini mohon dikirim ke:

PT. BPR Syariah Ingin Jaya
Jln. Banda Aceh-Medan Km. 9 Bundaran Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar
Telepon : (0651)8070093
Website : bankinginjaya.co.id
E-mail : bprs_InginJaya@yahoo.com